



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris merupakan salah satu dari bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia.¹ Penyelesaian hak-hak kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya

¹ H. Eman Suparman, “*Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*” PT Rafika Aditama, Bandung, Thn, 2011. hlm. 1.

seseorang, di atur oleh hukum waris. Dalam pengertian hukum “waris” sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun dalam hukum kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris beraneka ragam. Misalnya saja. Wirjono Prodjodokoro, menggunakan istilah “hukum warisan”. Hazairin, menggunakan istilah “hukum kewarisan”. Dan soeppomo menyebutnya dengan istilah “hukum waris”²

Waris dalam Perspektif islam adalah sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dalam keadaan bersih.³ Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda dan serta segala hak, “setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris.”⁴

Di dalam hukum Islam misalnya dikenal dengan “Hukum Syari’ah” yang berisi adanya lima macam suruhan atau perintatah yang disebut “*al-ahkam al-khamsah*” yaitu wajib, haram, sunnah, dan mubah. Adah atau adat ini dalam bahasa Arab disebut dengan “kebiasaan” yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi hukum adat adalah “hukum kebiasaan”.⁵

Mengenai masyarakat hukum adat, secara teoritis pembentukannya disebabkan karena adanya faktor ikatan yang mengikat masing-masing anggota masyarakat hukum adat. Faktor ikatan yang membentuk hukum adat secara teoritis adalah :

² H. Eman Suparman, “*Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*” PT Rafika Aditama, Bandung, Thn, 2011 hlm. 1.

³ *Ibid*, hlm, 13

⁴ *Ibid*, hlm, 13

⁵ Dewi Wulan Sari, “*Hukum Adat Indonesia suatu pengantar*” Rafika Aditama, Bandung, Thn, 2012. hlm. 1.

1. Faktor Genologis (keturunan)

2. Faktor Teritorial (wilayah)

Masyarakat Patrilineal atau sistem kekerabatan Patrilineal adalah masyarakat yang menarik garis keturunan dari bapak (garis laki-laki), sedangkan dari garis keturunan ibu disingkirkan.⁶

Didalam masyarakat di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar selatan Kota Denpasar yang masih kuat memegang teguh prinsip kekerabatan berdasarkan ikatan keturunan, perkawinan menurut hukum adat pada umumnya adalah perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata', tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.⁷ Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama dan kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketatanegaraan serta menyangkut upacara-upacara keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik hubungan manusia dan tuhan maupun manusia dengan manusia dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan di akhirat.

Dalam sistem kewarisan Patrilineal yang dianut kalangan *Sunni* sebenarnya terbentuk dari struktur budaya Arab yang bersendikan sistem kekeluargaan yang bercorak Patrilineal. Pada masa terbentuknya fiqh, ilmu

⁶ Dewi Wulan Sari, "*Hukum Adat Indonesia suatu pengantar*" Rafika Aditama, Bandung, Thn, 2012. hlm. 26.

⁷ H. Hilaman Hadikusuma, "*Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundang-undangan Adat dan Agama*" Mandar Maju, Bandung, Thn, 2007. hlm. 8.

pengetahuan mengenai bentuk-bentuk masyarakat belumlah berkembang. Sehingga para *fuqaha* dalam berbagai mazhab *fiqh* belum memperoleh perbandingan mengenai berbagai sistem kewarisan dalam berbagai bentuk masyarakat. Oleh karena itu tidaklah mengherankan bila hukum kewarisan yang kemudian disusun bercorak Patrilineal.⁸



تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَعْصِ

⁸ Hazairin, *Hendak Kemana Hukum islam*, cet 3 (Jakarta: Tintamas, 1976), hlm 3

اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Artinya :

(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (An-Nisa' ayat 7)

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua], maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta

bentuk masyarakat dan sistem menarik garis keturunan yang penulis kemukakan di atas tadi, membawa konsekuensi terhadap orang-orang yang berhak tampil sebagai ahli waris.

Perkembangan hukum adat khususnya di Kelurahan Sesean, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar bagi keluarga muslim sebagian masih menggunakan adat Patrilineal yang secara tidak langsung sebelumnya dipraktekkan oleh agama yang lebih dulu ada daripada agama Islam yaitu agama Hindu. Darisini dapat dilihat terdapat *Inkonsistensi* dalam praktek pembagian harta warisan yang dilakukan oleh sebagian keluarga muslim di Bali.

Dari paparan diatas tentunya sangat menarik untuk dilakukan kajian lebih lanjut menjadi sebuah karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul: PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN KELUARGA MUSLIM DALAM SISTEM KEWARISAN PATRILINEAL (Studi di Desa Sesean, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pembagian warisan keluarga muslim dalam sistem kewarisan Patrilineal di desa Sesean, kecamatan Denpasar selatan, kota Denpasar?
2. Bagaimana pengaruh hukum Islam dalam praktik pembagian kewarisan Patrilineal di Desa Sesean, kecamatan Denpasar selatan, kota Denpasar ?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini untuk menghindari pembahasan yang terlalu melebar dan kurang mengarah dari pokok permasalahan yang sulit untuk mendapatkan satu kesimpulan yang konkrit, maka penulis rasa perlu adanya batasan-batasan yang jelas yaitu hanya mendeskripsikan waris patrenial di Desa Sasetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ditinjau dari hukum islam.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembagian warisan keluarga muslim masyarakat di desa Sasetan, kecamatan Denpasar selatan, kota Denpasar.
2. Untuk mengetahui bagaimana Islam melihat praktek pembagian waris keluarga muslim masyarakat di desa Sasetan, kecamatan Denpasar selatan, kota Denpasar

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan serta mampu memberikan pemahaman hal yang baru pada masyarakat di desa Sasetan, kecamatan Denpasar selatan, kota Denpasar tentang waris.
 - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya khususnya tentang praktik pembagian warisan yang berkembang di masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tersendiri khususnya pada di desa Sesetan, kecamatan Denpasar selatan, kota Denpasar.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kajian keilmuan bagi akademisi, khususnya bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis akan menggunakan sistematika pembahasan untuk menggambarkan isi dari penulisan penelitian tersebut, sebagai berikut:

Bab I : Memaparkan tentang pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan. Disini penulis ingin memberikan keterangan dan penjelasan mengenai latar belakang mengapa masalah tersebut harus diangkat dan diteliti, sehingga nampak jelas apa yang diteliti dan pentingnya pelaksanaan penelitian.

Bab II : Pada bab ini penulis akan menyajikan kajian pustaka yang meliputi penelitian terdahulu, teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian yang dimulai dengan hukum waris dalam Islam, hukum waris adat di Indonesia, perkembangan hukum waris patrilineal Bali. Kajian pustaka diperlukan untuk menegaskan, melihat kelebihan dan kekurangan teori tersebut terhadap apa yang terjadi di lapangan atau dalam praktiknya. Dan sebagai pijakan penulis untuk

mengelola dan menganalisa data yang didapatkan dilapangan.

Bab III : Pada bab ini metode penelitian akan disajikan, yang meliputi : jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan pengolahannya.

Bab IV : Analisa data dan paparan data merupakan bagian dari bab ini, dengan menyajikan kondisi objektif penelitian dan seputar Praktik Pembagian Warisan Dalam Sistem Patrilineal di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Kewarisan dalam Adat.

Bab V : Pada bab terakhir ini memuat kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan disertai pula saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.